

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Masjid juga memiliki peran sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas keagamaan bagi umat Islam. Apakah itu peringatan hari besar umat Islam, maulidan atau tempat pengajaran agama Islam lainnya. Bahkan zaman Rasulullah SAW Masjid bukan hanya untuk pengajaran agama Islam tapi berkaitan juga dengan politik dan strategi perang. Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nonlaba (*non profit oriented*) yang dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) terdapat tiga fungsi Masjid. Pertama, Masjid sebagai ibadah (*mdlahah*) juga merupakan tempat ibadah secara luas (*ghairu madhlah*) selama dilakukan dalam batas – batas syariah. Kedua, Masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid yang bersangkutan. Ketiga, Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat (Desy dkk,2014).

Masjid adalah simbol ibadah dan jika dimaknai sebagai akuntansi Masjid, maka Masjid berdampingan dengan sisi maskulin akuntansi yang selalu diartikan materialis (Ahyaruddin dkk,2017 ). Berdasarkan hasil kajian Puslitbang kehidupan beragama tahun 2004, bahwa hanya terdapat beberapa Masjid saja yang mampu memenuhi ketiga fungsi tersebut. Padahal mesjid merupakan sebuah entitas nonlaba yang memperoleh dana dari sumbangan masyarakat dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk sumbangan sosial lainnya. Maka pertanggungjawaban laporan keuangan ke publik sangat penting. Perlunya penyajian yang akuntabel dan transparan dalam pelaporannya, agar menjadi kunci sukses bagi entitas untuk tetap eksis dan bertahan di tengah-tengah masyarakat (Badu dan Hambali, 2014).

Di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga dengan mudah menemukan di setiap tempat ada Masjid. Mulai dari perkantoran, pinggir jalan raya, perumahan, sampai di dalam sebuah gang kecil ada Masjid. Tujuan yaitu memudahkan kaum muslimin melakukan ibadah ketika waktu sholat masuk dan sebagai pusat kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga banyak Masjid-Masjid baru dibangun atau masjid lama yang di renovasi dengan berbagai macam bentuk arsitektur demi kenyamanan dalam beribadah. Maka banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk dana untuk pembangunan Masjid atau untuk kegiatan-kegiatan Masjid. Maka setiap pengurus Masjid harus dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana tersebut. Apakah dana tersebut didapat dari sumbangan suka rela, hibah dari masyarakat atau bantuan dana dari pemerintah .

Pada saat ini kita masih banyak melihat Masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal mengelola sumber daya yang dimiliki merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber daya yang diberikan kepada Masjid sudah digunakan dengan benar. Oleh karena itu, Masjid sebagai salah satu organisasi nonlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Salah satu pertanggung jawabannya yaitu diperlukannya sebuah akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan Masjid. Hal tersebut dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi Masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya (Andikawati dan Winarno, 2014).

Menurut Khanan (2010), ta'mir Masjid sebagai pengelola kurang mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Oleh karena itu pengelolaan keuangan Masjid harus dilakukan secara baik agar dapat berjalan secara efektif. Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggung jawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya. (Wijangsongko, 2014).

Masjid merupakan salah satu jenis organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Pada organisasi nirlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak, karena biasanya organisasi nirlaba ini didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok. Modal untuk mendirikan organisasi nirlaba ini juga bisa didapatkan melalui hutang. Sedangkan untuk kebutuhannya operasionalnya bisa didapatkan dari pendapatan atau jasa yang diberikan. Namun hal ini berakibat pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran yang penting bagi para pemakai dari laporan keuangan masjid tersebut.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 45 terdiri dari paragraf 01 sampai dengan 36 yang telah diganti dengan ISAK no. 35, isi dari pernyataan ini merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. dilihat dari cara memperoleh sumber dayanya. Sumber daya yang diperoleh dari entitas nirlaba, berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan. Sumber daya tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional yang dilakukan di dalam entitas nirlaba (Aji, 2017).

Menurut Ikhsan (2010:3), *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi terkini oleh pemakai informasinya. Standar akuntansi keuangan untuk otoritas nonlaba adalah ISAK No.

35 yang telah di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 28 September 2018 yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nonlaba. Jika entitas dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan entitas tersebut, perlu menyesuaikan deskripsi yang di gunakan untuk beberapa pos dengan baik yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.

Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Bastian (2001:76-77) siklus akuntansi di kelompokkan dalam tiga tahap yaitu : tahap pencatatan yang terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, jurnal, posting ke buku besar, tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Dan tahap pelaporan terdiri dari neraca, laporan surplus dan defisit, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva bersih dan catatan atas laporan keuangan.

Masjid Baitul Hidayah Puger, merupakan salah satu dari sekian banyak masjid yang ada di puger masjid Baitul Hidayah adalah masjid yang banyak dikenal orang bukan saja tempatnya yang strategis di kecamatan puger namun lebih dari itu masjid ini memiliki visi untuk mengembangkan diri sebagai masjid yang juga memberikan layanan dan solusi kebutuhan umat. Masjid Baitul Hidayah Puger didirikan di tanah wakaf dan di bangun pada 17 Agustus 1978. Meskipun masjid Baitul Hidayah Puger sudah dikenal banyak orang dan termasuk organisasi nirlaba yang seharusnya pencatatan laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi dan terperinci jelas, tetapi masjid Baitul Hidayah sampai saat ini masih belum mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Hal ini dikarenakan para pengurusnya berpendidikan sebatas sampai SMA dan sederajat. Selain itu tidak jarang adanya lansia atau anak-anak membawa "kotak amal Baitul Hidayah" yang keliling diperumahan sekitar masjid untuk meminta sumbangan sedangkan disisi lain pendapatan yang di ungkapkan sebagian besar dari infaq sholat jum'at dan infaq setelah sholat ied (hari raya idul fitri) membuat lebih penasarannya masyarakat akan pengelolaan keuangan masjid Baitul Hidayah Puger.

Adanya fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa pengurus masjid, khususnya bendahara masjid yang merupakan pengelola keuangan masjid bukan dari seorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, melainkan warga sekitar masjid yang ditunjuk secara sukarela untuk menjadi pengurus masjid. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan tidak adanya kejelasan secara mendetail dan terperinci

mengenai bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid. Sumber dana masjid yang umumnya diperoleh dari para *jama'ah* yang beribadah di masjid tersebut tidak dapat diketahui secara jelas penggunaan dana tersebut diperuntukkan untuk apa saja. Bendahara masjid hanya menggunakan sistem pencatatan sederhana dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, yang kemudian total pemasukan dan pengeluaran hanya disampaikan pada setiap jum'at tanpa adanya rincian secara jelas terkait penggunaan dana masjid tersebut.

Oleh karena itu, pembuatan laporan keuangan masjid sangat penting karena dari laporan keuangan tersebut akan menampilkan dan menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Selain itu pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas dan dapat meningkatkan kepercayaan para jamaah masjid yang telah memberikan sumbangan. Hal tersebut akan membuat perbaikan mengenai laporan yang sesuai, dengan demikian peneliti akan menjadikan penyajian laporan keuangan yang baik yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35 tentang pelaporan keuangan organisasi nonlaba pada Masjid Baitul Hidayah Puger.

Proses pencatatan pada masjid ini dimulai dari pencatatan pada buku kas harian untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas per hari, kemudian di buat laporan posisi keuangan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN ISAK 35 PADA MASJID BAITUL HIDAYAH PUGER JEMBER".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka di dapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi di Masjid Baitul Hidayah Puger?
2. Bagaimana penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan Masjid Baitul Hidayah Puger?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di Masjid Baitul Hidayah Puger?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang ada di Masjid Baitul Hidayah Puger?

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan bagi masjid Baitul Hidayah Puger dalam melakukan pencatatan pengelolaan keuangan maupun yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat dan dapat memahami lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan (dalam hal ini kegiatan yang menyangkut keuangan) agar sesuai dengan prinsip maupun ketentuan akuntansi yang berlaku.

2. Mafaat Akademis

Dapat menjadi referensi untuk kemajuan pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Jember serta dapat menjadi acuan mahasiswa yang ingin mendalami lebih lanjut tentang penelitian ini.